

**MEMBANGUN KECERDASAN BERPOLITIK: TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB IMAM
(PEMUKA AGAMA)****Antonius Moa**

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Email: rmantonpr@gmail.com**ABSTRAK**

Tulisan ini mengangkat urgensi membangun kecerdasan berpolitik dalam terang iman Katolik, dengan menyoroti peran dan tanggung jawab para imam sebagai pembina moral umat dalam kehidupan sosial-politik. Politik dipahami bukan sebagai arena kekuasaan penuh intrik, melainkan sebagai tindakan manusiawi yang bertujuan mewujudkan *bonum commune* (kesejahteraan umum). Berdasarkan landasan kodrati manusia sebagai makhluk sosial dan ajaran Gereja Katolik, keterlibatan dalam politik merupakan panggilan iman yang melekat pada martabat manusia. Gereja tidak berpolitik praktis, tetapi mendorong keterlibatan etis dan profetis umat, khususnya kaum awam, melalui pendidikan politik, pembinaan suara hati, dan pengembangan budaya politik yang bermartabat. Para imam dipanggil untuk menjadi gembala rohani, penafsir realitas sosial dalam terang Injil, dan pembina kader politik yang handal. Tulisan ini merumuskan delapan tolok ukur tindakan politik yang cerdas, sebagai pedoman moral dan spiritual dalam membangun keterlibatan politik yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: *politik, kecerdasan, keterlibatan, tugas dan tanggung jawab, imam*

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang politik selalu menarik untuk diulas, dibahas, didiskusikan bahkan diperdebatkan. Hal ini terjadi karena disadari atau tidak, politik selalu bersentuhan dengan berbagai macam bidang kehidupan. Sehingga politik bisa dibahas atau disoroti dari berbagai perspektif kehidupan manusia. Mengapa demikian? Sebab, politik itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, kesejahteraan bersama (*bonum commune*)¹. Pada hakikat ini setiap orang diingatkan bahwa politik merupakan usaha dan sarana yang membantu manusia untuk menyelenggarakan hidup yang layak secara manusiawi. Hidup yang layak secara manusiawi tidak hanya terwujud dalam salah satu aspek atau bidang kehidupan, tetapi menyangkut semua aspek atau bidang kehidupan manusia.

Pada kesadaran akan hakikat politik tersebut terbersit sebuah pertanyaan yang mengusik: Berpolitik, harus cerdas atau cerdik? Pertanyaan ini muncul karena banyak orang mempunyai kesan/berpendapat bahwa "Politik itu kotor", bahkan "harus kotor". Oleh karena itu dibutuhkan kecerdikan-kecerdikan untuk mencapai tujuan. Mengapa? Politik dikaitkan secara erat dengan "kekuasaan" secara sempit dan negatif yaitu perjuangan/usaha untuk mencapai bahkan merebut kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.² Karena itu yang sangat dibutuhkan adalah "INTRIK: persekongkolan rahasia"³. Suatu tindakan atau perbuatan yang mengacu pada rencana/rancangan atau tindakan yang dilakukan secara tersembunyi, penuh tipu muslihat, dan terkadang manipulatif (unsur manipulasi dan

¹ Isidorus Lili Jawa, *Mengapa Takut Berpolitik?* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), 39.

² Bdk. Isidorus Lili Jawa, *Mengapa...*, 40

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 337.

kerahasiaan). Intrik-intrik sering muncul dalam bentuk skema rahasia untuk menjatuhkan seseorang. Intrik-intrik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemimpinan seperti itu menjadikan politik semakin kompleks. Pihak-pihak seperti itu seringkali mengelabui banyak orang dengan slogan “demi kepentingan rakyat alias banyak orang”. Pada akhirnya tindakan korupsi, kolusi, nepotisme menjadi citra wajah politik.⁴

Walau demikian, di lain pihak banyak juga yang berpendapat/memahami bahwa politik itu adalah sebuah “SENI” untuk mengatur dan mengurus negara atau ilmu kenegaraan. Pada konteks ini politik mencakup urusan yang berkaitan dengan kepentingan umum, *bonum commune* (kesejahteraan umum). Mengapa? Pendapat atau paham ini merujuk pada kata politik yang berasal dari istilah “polis”, yang berarti “kota” atau “negara kota”. Pada asal kata ini, politik mempunyai makna sebagai seni mengatur dan mengurus negara atau ilmu kenegaraan.⁵ Politik lalu dipahami sebagai aktivitas yang terkait dengan pengelolaan dan tata kelola masyarakat di sebuah polis. Dalam konteks ini, politik kemudian dipahami sebagai konsep yang mempunyai makna yang lebih luas, mencakup: seni, ilmu, dan praktik dalam mengatur kekuasaan, membuat keputusan, serta menciptakan kebijakan untuk kepentingan bersama.

Pada pemahaman ini, politik disadari sebagai LEGITIMASI KEKUASAAN dengan segala dinamikanya yang dapat dan harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama (masyarakat sebagai keseluruhan). Karena itu, politik harus berkaitan dengan ETIKA/MORAL bahkan HARUS BER-ESTETIKA! Politik menjadi TINDAKAN MANUSIAWI (*actus humanus*) yang harus dipertanggungjawabkan! Maka, politik sangat membutuhkan kecerdasan manusiawi, bukan kecerdasan yang penuh intrik-intrik!⁶

PEMBAHASAN

Politik: Suatu Keniscayaan pada Struktur Kodrati Manusia

Apa pun kesan, pendapat, pemahaman, dan kesadaran tentang politik, satu hal yang pasti yang tidak bisa diingkari atau dibantah oleh argumentasi apa pun yaitu bahwa POLITIK merupakan suatu keniscayaan dalam kodrat manusia. Keniscayaan ini bukan sebuah kategori abstrak apalagi merupakan rekayasa dari kemanusiaan manusia. Keniscayaan ini justru berdasar pada kenyataan yang sangat fundamental yang berdasar pada realitas kodratnya, yaitu struktur keberadaan (konstitusi eksistensial) manusia itu sendiri. Secara sederhana struktur keberadaan manusia dibagi dalam dua area besar, yaitu area fisik atau biologis atau dan area meta-fisik atau meta-bilogis.⁷

Pada area fisik atau biologis manusia menemukan dan menyadari dirinya suatu struktur fenomenologis dari adanya dirinya sebagai manusia bahwa ia mempunyai dimensi “keber-fisikan”. Pada dimensi keberfisikan ini manusia menemukann dirinya ada bersama segala sesuatu yang ada secara fisik. Namun pada area ini, manusia juga menyadari dirinya sebagai ada yang berada dalam realitas fisik/tubuh yang hidup.

⁴ Hendro Setiawan, *Pergilah, Kita Diutus. Sebuah Refleksi atas Perutusan Awam Katolik di Masa Kini* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), 168.

⁵ Isidorus Lilijawa, *Mengapa...*, 29.

⁶ Bdk. Isidorus Lilijawa, *Mengapa...*, 29-34

⁷ S. Palumbieri, *L'Uomo, Questa Meraviglia. Antropologia Filosofica I, Trattato sulla Costituzione e Antropologica* (Manuali) (Roma: Urbaniana University Press, 1999), 98-398. Bdk. Antonius, Moa, *Seksualitas Manusia sebagai Realitas dan Panggilan kepada Cinta Kasih, Refleksi atas Hakikat Seksualitas Manusia dalam Logos Volume 2/Nomor 1*, 2004, 5.

Manusia secara kodrati dalam struktur dirinya ada dan berada (hidup) bersama yang lain.⁸

Kesadaran diri manusia tidak berhenti pada area fisik/tubuh atau biologis. Manusia menemukan dan menyadari dirinya melampaui area itu, yaitu area meta-fisik atau meta-bilogis. Pada area meta-fisik atau meta-bilogis ini, manusia menemukan bahwa dirinya bukan hanya sekadar memiliki fisik atau tubuh yang hidup di dalam dirinya sendiri. Manusia memiliki jiwa (mental) dan roh (spiritual). Berkat kemampuan jiwa dan roh yang ada padanya itu manusia juga mengalami dan menyadari bahwa adanya dan beradanya sebagai manusia yang adalah laki-laki dan perempuan adalah untuk dirinya (*per-Se*) dan untuk yang lain (*per-Altri*).⁹ Kenyataan pengalaman dan kesadaran ini menunjukkan secara jelas tegas bahwa sebagai manusia, setiap manusia pada struktur kodratinya mempunyai dimensi ganda, yaitu sebagai individu dan sosial.¹⁰

Sebagai makhluk yang mempunyai dimensi ganda: individual dan sosial tidak hanya terarah untuk dirinya (*per-Se*), tetapi juga terarah untuk yang lain (*per-Altri*). Keterarah kepada yang lain memberikan suatu kesadaran yang lebih dalam lagi bahwa manusia mempunyai dimensi transitifitas. Manusia mengalami dan menyadari dirinya selalu berada dalam jalinan atau jaringan ada dan berada dengan sesamanya: saya – engkau – kita bersama.¹¹ Kodrat ada dan berada bersama yang lain inilah yang memungkinkan dan menuntut usaha bersama yang menyangkut kepentingan umum atau berpautan dengan public (*pro bono publico*). Usaha bersama yang berkaitan dengan kepentingan dan urusan bersama atau umum inilah yang menjadi isi dan makna politik.¹²

Apa yang ditemukan dan disadari oleh manusia di dalam realitas struktur keberadaannya yang menjadi unsur konstitutif diri manusia, yaitu selalu berada dalam jalinan atau jaringan ada dan berada dengan sesamanya menegaskan secara gamblang bahwa manusia itu di dalam dirinya sendiri adalah makhluk politik. Aristotrles secara jelas dan tegas menyebut manusia sebagai makhluk politik (*politokon zoon*) yang secara harafiah berarti binatang yang hidup dalam sebuah polis atau “polis-animal”¹³. Sebagai makhluk politik secara kodrati manusia hidup dalam komunitas. Manusia membutuhkan sebuah bentuk kehidupan bersama dalam sebuah “polis” untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan mengembangkan seluruh kemampuan dirinya.¹⁴

Apa yang ditegaskan oleh Aristoteles tersebut bahwa politik merupakan sebuah keniscayaan kodrati manusia juga sejalan dengan keyakinan dasar tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat sebagai pribadi. Sebagai pribadi, manusia memiliki dua unsur dasar kemanusiaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu sebagai makhluk individual dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

Dua unsur dasar kemanusiaan sebagai makhluk individual dan sekaligus sebagai makhluk sosial menuntut manusia untuk hidup bersama dengan manusia yang lain, bahkan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tuntutan untuk hidup dalam kebersamaan dengan “yang lain” – manusia dan juga lingkungan sekitarnya – bukan hanya sekadar sebagai dorongan naluriah belaka tetapi juga menjadi kesadaran manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Setiap manusia memiliki kesadaran yang sangat

⁸ S. Palumbieri, *L'Uomo*,..., 98, 101-160. Bdk. Antonius Moa, *Seksualitas*..., 5.

⁹ S. Palumbieri, *L'Uomo*,..., 161, 163-389, . Bdk. Antonius Moa, *Seksualitas*..., 6.

¹⁰ Bdk. A. Autiero, “Seksualita”, dalam F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, eds, *Nuovo Dizionario di Teologia Morale* (Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni, 1999),1229-1230.

¹¹ S. Palumbieri, *L'Uomo*,..., 309, 311.

¹² Isidorus Lilijawa, *Mengapa*..., 29.

¹³ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik. Sebuah Analisis atas Etika Politik Aristoteles* (Maukere: Ledalero, 2010), 156-157.

¹⁴ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik*..., 157.

mendasar bahwa “ia tidak bisa hidup tanpa yang lain”. Pada kesadaran dasar ini setiap manusia mengakui kebenaran fundamental bahwa sebagai manusia, ia akan menjadi sempurna secara manusiawi justru di dalam kebersamaan dengan “yang lain”. Pada kesadaran fundamental inilah politik “sebagai usaha untuk mewujudkan *bonum commune* (kesejahteraan umum)” secara hakiki memiliki tempat dan peran yang sangat mendasar. Politik menjadi sebuah keniscayaan yang melekat erat pada kodrat dan martabat kemanusiaan manusia.

Iman dan Ajaran Sosial Gereja Katolik

Kesadaran dasar bahwa politik merupakan keniscayaan yang melekat erat pada kodrat dan martabat manusia dapat kita temukan juga dalam ajaran Iman Gereja Katolik. Gereja Katolik menegaskan keyakinan imannya bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermartabat oleh Allah, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah (Kej. 1:26-27)¹⁵. Pada keyakinan dasar iman Ini Gereja Menegaskan Lebih Lanjut:

Tetapi Allah Tidak Menciptakan Manusia Seorang Diri: Sebab Sejak Awal Mula “Ia Menciptakan Mereka Pria Dan Wanita” (Kej 1;27). Rukun Hidup Mereka Merupakan Bentuk Pertama Persekutuan Antar Pribadi. Sebab Dari Kodratnya Yang Terdapat dalam Manusia Bersifat Sosial; Dan Tanpa Berhubungan Dengan Sesama Ia Tidak Dapat Hidup Atau Mengembangkan Bakat-Pembawaannya.¹⁶

Sebagai gambar dan rupa Allah manusia dipanggil oleh Allah, sang Pencipta, untuk hidup di dalam kebersamaan dengan sesamanya dan diberi tanggung jawab untuk mengolah dan mengelola dunia dan segala isinya secara adil dan bermartabat sesuai rencana dan kehendak Allah (Kej. 1:28).

Lebih lanjut di dalam ajaran sosialnya, Gereja Katolik menandakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa kehidupan politik itu bukan sebuah tambahan, melainkan sesuatu yang melekat erat dalam pribadi manusia itu sendiri.

Dari sifat sosial manusia nampaklah, bahwa pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Sebab asas, subjek dan tujuan semua lembaga sosial ialah dan memang seharusnya pribadi manusia; berdasarkan kodratnya ia sungguh-sungguh memerlukan hidup kemasyarakatan. Maka karena bagi manusia hidup kemasyarakatan itu bukanlah suatu tambahan melulu, oleh karena itu melalui pergaulan dengan sesama, dengan saling berjasa, melalui dialog dengan sesama saudara, manusia berkembang dalam segala bakat-pembawaannya, dan mampu menanggapi panggilannya.¹⁷

Lebih lanjut Gereja menegaskan demikian:

Diantara ikatan-ikatan sosial, yang diperlukan bagi pertumbuhan manusia, ada, seperti keluarga dan masyarakat politik, yang lebih langsung selaras dengan kodratnya sedalam-dalamnya; ada pula ikatan-ikatan yang lebih bersumber pada kehendak bebasnya. Pada zaman kita sekarang, karena pelbagai sebab, hubungan-hubungan timbal-balik dan saling ketergantungan semakin berlipatganda. Karena itulah muncul pelbagai perserikatan dan lembaga, entah yang bersifat umum entah swasta. Kenyataan yang disebut sosialisasi itu memang bukannya tanpa

¹⁵ Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* (Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini), Penerjemah R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1993), no. 12-16. Untuk selanjutnya disingkat GS.

¹⁶ GS 12.

¹⁷ GS 25.

bahaya; tetapi juga membawa banyak keuntungan, untuk memantapkan dan mengembangkan sifat-sifat pribadi manusia dan membela hak-haknya.¹⁸

Melalui penegasan-penegasan tersebut, Gereja secara jelas menyatakan bahwa politik merupakan dimensi yang melekat pada kodrat manusia dan merupakan ekspresi dari martabatnya sebagai pribadi yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

Yurisdiksi atas Bidang Politik: Negara atau Agama?

Uraian di atas telah mengungkapkan secara gamblang bahwa politik merupakan salah satu dimensi yang melekat erat pada kodrat manusia yang merupakan ekspresi dari martabatnya sebagai pribadi. Walau demikian, masih ada persoalan yang harus diperjelas: “Siapa yang memiliki yurisdiksi atas bidang politik, negara atau agama?” Ini adalah pertanyaan pertanyaan klasik yang terus bergema dalam sejarah umat manusia.

Ada berbagai jawaban yang dapat kita temukan atas pertanyaan tersebut. Ada jawaban-jawaban yang didasarkan pada pemisahan yang sangat ketat atau hitam putih atas yurisdiksi yang dimiliki atas bidang politik. Jawaban-jawab tersebut pada dasarnya membuat pemisahan total antara negara dan agama. Negara mengatur hal-hal duniawi: hukum, keamanan, kesejahteraan umum. Sedangkan agama mengatur hal-hal rohani: moralitas, makna hidup, keselamatan.

Gereja Katolik dan banyak filsuf politik modern tidak memilih salah satu secara mutlak, melainkan menekankan pembedaan peran, oleh karena itu harus terjadi kerja sama antara negara dan agama demi kebaikan bersama. Gereja Katolik mengakui bahwa agama dan negara memiliki otonomi masing-masing di bidangnya. Namun otonomi itu bukan membawa pemisahan, apalagi permusuhan. Sebaliknya, keduanya harus bekerja sama demi martabat manusia dan kebaikan bersama.²⁰

Pada penegasan itu, Gereja Katolik menyatakan bahwa politik bukan milik negara saja. Gereja mengajarkan bahwa keterlibatan dalam politik adalah bagian dari panggilan umat beriman untuk mewujudkan keadilan dan kasih dalam Masyarakat.²¹ Penegasan tersebut juga menyatakan secara gamblang bahwa Gereja tidak menghendaki negara teokratis. Gereja tidak ingin memerintah negara, tetapi menjadi suara moral yang membimbing nurani publik.

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa yurisdiksi atas politik bukan milik eksklusif negara atau agama, melainkan sebuah kerja sama demi terwujudnya martabat manusia dan kebaikan bersama. Di mana, negara mengelola struktur dan hukum demi kesejahteraan bersama. Sedangkan, agama menginspirasi nilai dan etika dalam kehidupan publik. Oleh karena itu Gereja Katolik secara sadar tidak berpolitik praktis, tetapi mendorong umatnya untuk terlibat aktif secara etis dan profetik dalam politik.

Dasar Keterlibatan Gereja dalam Bidang Politik

Gereja Katolik telah menandakan ajarannya keterlibatannya dalam bidang politik. Namun, pertanyaannya adalah: “Apa dasar keterlibatan Gereja Katolik dalam bidang politik?” Dasar keterlibatan Gereja Katolik dalam bidang politik berakar pada ajaran iman, martabat manusia, dan panggilan untuk mewujudkan kebaikan bersama

¹⁸ GS 25.

¹⁹ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik*, dalam *Seri Dokumen Gerejawi* (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2003).

²⁰ GS 76.

²¹ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Peran Serta Umat...*

(*bonum commune*). Walau demikian, Gereja tidak berpolitik praktis, tetapi mendorong umatnya untuk terlibat aktif secara etis dan profetik dalam kehidupan sosial-politik.

Kesadaran akan dasar keterlibatan ini bukan sebuah tambahan, melainkan kesadaran yang melekat erat pada hakikat Gereja itu sendiri. Di satu pihak, Gereja menyadari hakikat dan Misi/Perutusannya sebagai Tubuh Mistik Kristus, tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia.²² Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus itu ada di dunia, terlibat dalam kenyataan dunia, dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam peziarahan menuju kerajaan Bapa.²³ Di lain pihak, gereja juga menyadari bahwa politik sebagai salah satu dimensi kemanusiaan manusia memiliki hakikat dan misinya sebagai salah satu bidang kehidupan manusia, yang merupakan partisipasi semua orang untuk mengatur kepentingan bersama guna mencapai kesejahteraan umum. Perwujudan dimensi politik ini terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya (formal – informal, langsung – tidak langsung, dll).

Kesadaran akan keterlibatan Gereja di bidang politik tersebut didasarkan pada hakikat – perutusan manusia sebagai manusia (struktur kodrati) dan manusia yang beriman (struktur ilahi/adikodrati). Pada kesadaran di atas dasar tersebut Gereja mengaskan bahwa politik adalah salah satu bidang kerasulan Gereja/kebudayaan yang dipercayakan Tuhan yang harus digarap. Oleh karena itu, bagi Gereja iman dan politik tidak boleh dipisahkan secara hitam – putih, melainkan merupakan dua sisi dari satu mata uang.²⁴

Sebab, gereja menyadari bahwa Kehidupan sosial dan politik merupakan dimensi yang melekat pada kodrat manusia. Oleh karena itu keterlibatan dalam bidang politik merupakan ekspresi dari kesadaran akan martabat manusia sebagai pribadi yang hidup dalam masyarakat. Politik merupakan medan pelayanan kasih dan keadilan. Maka, setiap umat Katolik dipanggil untuk menjadi garam dan terang dalam dunia politik. Keterlibatan dalam bidang politik adalah bentuk konkret dari tanggung jawab sosial umat beriman. Politik adalah cara untuk mewujudkan solidaritas, subsidiaritas, dan keadilan sosial.²⁵

Pada keterlibatan dalam bidang politik ini kaum awam dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai Kristiani di tengah dunia. Keterlibatan politik merupakan bagian dari kerasulan awam. Kesadaran Gereja ini dirumuskan secara tegas dalam Dekrit *Apostolicam Actuositatem* tentang Kerasulan Awam demikian:

Terbukalah gelanggang kerasulan yang tak terduga luasnya di tingkat nasional maupun internasional, terutama bagi kaum awam, untuk mengabdikan diri kepada kebijaksanaan kristiani. Dalam berbakti kepada bangsa dan dalam menunaikan tugas-tugas kewarganegaraan dengan setia, Umat katolik hendaknya menyadari kewajibannya untuk memajukan kesejahteraan umum yang sejati. Hendaknya mereka berusaha berpengaruh dengan bobot pandangan mereka, sehingga pemerintahan dijalankan dengan adil, dan hukum-hukum selaras dengan tuntutan-tuntutan moral serta menunjang kesejahteraan umum. Hendaknya orang-orang katolik, yang mahir di bidang politik, dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani, jangan menolak untuk

²² Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium* (Konstitusi Dogmatis tentang Gereja), penerjemah R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1993), no. 1-17. Untuk selanjutnya disingkat LG.

²³ LG 1-17, GS 1ss.

²⁴ GS 43.

²⁵ Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, Terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI (Jakarta: KWI, 2007), 189-196. Untuk selanjutnya ditulis Kompendium ASG.

menjalankan urusan-urusan umum. Sebab dengan jasa-jasa mereka yang pantas dihargai itu mereka dapat mendukung kesejahteraan umum, dan sekaligus merintis jalan bagi Injil.”²⁶

Tugas dan Tanggung Jawab Para Imam dalam Bidang Politik

Jika keterlibatan politik merupakan bagian dari kerasulan awam, maka pertanyaannya adalah: Apa tugas dan tanggung jawab para Imam (hirarki) dalam bidang politik?” haruslah diakui bahwa keterlibatan para imam Katolik dalam bidang politik adalah isu yang sangat sensitif dan kompleks. Oleh karena itu, Gereja Katolik membatasi secara tegas keterlibatan imam dalam politik praktis, namun tetap mengakui peran profetis mereka dalam membimbing umat secara moral dan spiritual.

Kitab Hukum Kanonik menegaskan demikian: “Para klerikus dilarang menerima jabatan-jabatan publik yang membawa serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil.”²⁷ Kanon ini menegaskan bahwa imam (klerikus) dilarang menduduki jabatan publik yang melibatkan pelaksanaan kekuasaan sipil. Tujuannya adalah menjaga netralitas dan fokus pelayanan rohani, agar tidak tercampur dengan ambisi kekuasaan duniawi.

Lebih lanjut ditegaskan demikian: “Para klerikus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia.”²⁸ Selanjutnya, dalam paragraf kedua ditegaskan lebih tajam, demikian: “Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum.”²⁹ Pernyataan ini menegaskan bahwa imam tidak boleh aktif dalam partai politik atau serikat pekerja, kecuali jika otoritas Gereja menilai bahwa keterlibatan itu diperlukan demi hak Gereja atau kebaikan bersama.

Dengan demikian, Gereja melarang imam terlibat dalam politik praktis, namun menegaskan peran mereka sebagai pembina hati nurani umat. Dalam *Gaudium et Spes*, imam disebut memiliki tugas untuk “memberikan penyuluhan dan kekuatan rohani bagi umat awam yang terlibat dalam karya kerasulan ini.”³⁰ Dengan demikian, imam mempunyai tugas dan tanggung jawab menjadi penjaga martabat manusia dalam politik, penafsir realitas sosial dalam terang Injil, dan pembina kader-kader politik yang bermoral dan beriman. Ia berperan sebagai gembala yang menuntun umat agar tidak hanya cerdik secara taktis, tetapi cerdas secara etis dan spiritual.

Penegasan ini mempunyai implikasi pastoral bagi peranan dan tanggung jawab imam, yaitu bahwa imam harus menjadi gembala rohani, bukan aktor politik. Keterlibatan profetis para imam tetap diperbolehkan: menyuarakan keadilan, etika, dan nilai Injil dalam kehidupan publik. Dalam konteks Indonesia dan Pancasila, imam dipanggil untuk menjadi penjaga moral bangsa, mendorong umat untuk berpolitik secara etis dan bertanggung jawab. Para imam menjadi menjadi penyatu umat, bukan pemecah belah.

Tuntutan Mendasar

²⁶ Konsili Vatikan II, *Apostolicam Actuositatem* (Dekrit tentang Kerasulan Awam), Penerjemah R. Hardawiryana (Jakarta: KWI, 1993), no. 14. Untuk selanjutnya disingkat AA.

²⁷ Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) dalam, terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI (Jakarta: KWI, 2004), Kanon 285 §3, Untuk selanjutnya ditulis Kanon diikuti nomor Kanon.

²⁸ Kanon 287 § 1

²⁹ Kanon 287 § 2

³⁰ GS 43.

Politik telah disadari sebagai bagian tak terpisahkan dari kodrat manusia. Gereja menyadari dan mengakui tanggung jawab keterlibatannya dalam bidang ini. Karena hal ini sangat penting dan menyentuh inti dari misi Gereja dalam dunia. Maka, Gereja menyadari tuntutan moral, pastoral, dan formasional untuk melahirkan kader-kader politik yang handal, bermoral, dan beriman. Melalui dokumen *Gaudium et Spes*, Gereja menyadarkan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan keduniaan beberapa hal penting ini.

Secara khas – meskipun tidak eksklusif – tugas kewajiban maupun kegiatan keduniaan (sekular) termasuk kewenangan kaum awam. Maka bila mereka secara perorangan maupun kolektif, bertindak sebagai warga dunia ini, hendaknya mereka jangan hanya mematuhi hukum-hukum yang khas bagi masing-masing bidang kerja, melainkan hendaknya berusaha juga meraih kemahiran yang sungguh bermutu dibidang itu. Hendaklah mereka dengan sukarela bekerja sama dengan sesama yang mengejar tujuan-tujuan yang sama. Hendaknya mereka mengakui tuntutan-tuntutan iman serta dikuatkan olehnya, dan tanpa ragu-ragu – bila diperlukan – merekayasa usaha-usaha baru dan mewujudkannya. Termasuk kewajiban bagi suarahati mereka yang sudah terbentuk dengan baik, untuk mengusahakan supaya hukum ilahi tertanamkan dalam kehidupan kota duniawi ini.³¹

Berdasarkan penegasan ini kita dapat mengatkan bahwa, Gereja memiliki kesadaran untuk melahirkan kader-kader politik yang handal, yaitu:³²

- Mematuhi hukum – hukum yang khas dalam bidang politik
- Meraih kemahiran yang sungguh bermutu dalam bidang politik
- Bekerja sama dengan semua yang berkehendak baik
- Mengakui dan dikuatkan oleh tuntutan iman, serta mampu berinisiatif-kreatif untuk mengupayakan usaha-usaha baru dalam mewujudkannya
- Mengusahakan supaya hukum ilahi tertanam dalam kehidupan tata dunia ini

Pada kesadaran untuk melahirkan kader-kader politik yang handal tersebut lahir pertanyaan ini: “Bagaimana Gereja mewujudkannya?” Gereja Katolik memiliki visi yang sangat jelas dan mendalam dalam membentuk kader-kader politik yang handal, bermoral, dan beriman. Usaha ini tidak bersifat politis-praktis, tetapi bersifat etis-profetis, yang berakar pada ajaran sosial Gereja dan panggilan kerasulan awam. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tindakan ini.

1. Pendidikan dan Pembinaan Politik³³

Pendidikan politik dipandang sebagai bagian dari formasi iman dan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat diselenggarakan melalui seminar, kursus, lokakarya, dan pelatihan kader awam. Pendidikan dan pelatihan ini berfokus pada: Etika politik dan ajaran sosial Gereja, prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, keterampilan kepemimpinan dan advokasi

2. Pembinaan Suara Hati Kristiani³⁴

³¹ GS 43.

³² Bdk. GS. 43.

³³ GS 43; Kompendium ASG 531–533.

³⁴ GS 43; Yohanes Paulus II, *Christifideles Laici* (Seruan Apostolik tentang Panggilan dan Perutusan Kaum Awam dalam Gereja dan Dunia), terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI (Jakarta: KWI, 2005), No. 42. Untuk selanjutnya disingkat CL.

Gereja menekankan pentingnya formasi hati nurani yang benar dan matang untuk terlibat dalam kerasulan di bidang politik. Oleh karena itu, para imam dan pendamping rohani berperan sebagai pembina moral dan penafsir realitas sosial dalam terang Injil.

Tujuannya supaya agar kader politik tidak hanya cerdik secara taktis, tetapi cerdas secara etis dan spiritual.

3. Mendorong Keterlibatan Awam

Gereja menegaskan bahwa politik adalah medan kerasulan awam. Pada tugas perutusan dalam bidang politik kaum awam dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan publik. Kaum awam didorong untuk aktif dalam partai politik, parlemen, pemerintahan, dan organisasi masyarakat.³⁵

4. Kolaborasi Hirarki dan Awam³⁶

Gereja sudah menegaskan bahwa para imam tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi menjadi pendamping dan pembina. Oleh karena itu, Gereja mendorong sinergi antara imam, awam, keluarga, dan komunitas dalam membentuk kesadaran politik yang sehat.

5. Membangun Budaya Politik yang Bermartabat³⁷

Gereja selalu berdaya upaya mengembangkan budaya politik yang berlandaskan martabat manusia, keadilan, dan solidaritas. Untuk itu, Gereja selalu mendorong kader politik untuk: menolak korupsi dan kekerasan, mengutamakan kepentingan umum, terbuka terhadap dialog dan kerjasama lintas iman

6. Menumbuh kembangkan Lembaga Pendidikan dan Sosial Gereja

Usaha Gereja untuk melahirkan kader-kader politik tersebut dilakukan melalui Lembaga Pendidikan dan Sosial Gereja, seperti: Sekolah, Universitas Katolik, dan Ormas Katolik (PMKRI, WKRI, Pemuda Katolik, ISKA, dll.). Gereja berusaha untuk membangun kesadaran politik melalui pendidikan karakter, kepemimpinan, dan keterlibatan sosial.

Prinsip Tindakan Politik Cerdas: Tolok Ukur Atau Pedoman Tindakan Politik Yang Cerdas

Politik disadari sebagai tindakan manusiawi yang didasarkan pada kesadaran diri sebagai makhluk sosial untuk mewujudkan *bonum commune*. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan kesadaran (tahu, mau, mampu) yang dilandaskan pada dua dasar ini, yaitu: Moralitas (Manusia yang manusiawi) dan Iman (Manusia yang ber-Tuhan). Pada kedua dasar ini, dapat kemukakan beberapa patokan sebagai tolok ukur atau norma bagi tindakan politik yang cerdas.

1. Hormat akan Martabat Pribadi Manusia³⁸

- Perwujudan utuh *bonum commune* merupakan tanggung jawab setiap orang dalam keseluruhan tindakan sadar manusia. Upaya perwujudan itu bertujuan

³⁵ Konsili Vatikan II, *Apostolicam Actuositatem* (Dekrit tentang Kerasulan Awam) dalam Seri Dokumen Konsili Vatikan II, terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI (Jakarta: KWI, 2005) no. 13-14. Untuk selanjutnya disingkat Komentarium ASG No. 565-574.

³⁶ Kanon 287 §2; GS 76.

³⁷ Fransiskus, *Evangeli Gaudium* (Sukacita Injil) dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 94, terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI (Jakarta: KWI, 2017), no. 205-208. Untuk selanjutnya disingkat EG; Fransiskus, *Fratelli Tutti* (Semua Saudara) dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 124, terj. Martin Harun, OFM (Jakarta: Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021), no. 176-197. Untuk selanjutnya disingkat FT.

³⁸ GS 25; Komentarium ASG No. 106-107; *Katekismus Gereja Katolik*, terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI (Jakarta: KWI, 2004), no. 1929-1932. Untuk selanjutnya disingkat KGK.

untuk memuliakan pribadi manusia dalam segala dimensinya, baik dalam tatanan kodrati maupun adikodrati.

- Perwujudan *bonum commune* secara definitif, menuntut tindakan politis yang beraneka ragam sesuai lingkungan pelaksanaannya.
- Tindakan politis merupakan suatu kehadiran, dialog dan pelayanan yang mencakup keseluruhan dimensi kemanusiaan manusia maka, *tolok ukur atau norma utama untuk penilaian dan tindakan (moralitas) politik adalah* martabat pribadi manusia, yang mengandung penghormatan dan pemajuan semua hak sosial dan pribadi yang melekat pada kodratnya.

2. Dialog Penuh Hormat³⁹

- Mengingat bahwa saat ini terjadi perubahan-perubahan mendalam yang menimbulkan masalah-masalah baru, maka dibutuhkan keterlibatan semua orang yang berkehendak baik.
- Oleh karena itu, tindakan politik harus terlaksana dalam kerja sama dengan semua kekuatan yang hidup dan berkarya dalam dunia sekarang ini.
- Maka, *tolok ukur atau norma tindakan politik yang kedua adalah* melibatkan diri dalam dialog penuh hormat sebagai suatu metode yang tepat dalam mencari penyelesaian masalah melalui kesepakatan-kesepakatan yang terprogram dan operatif.

3. Perjuangan demi Keadilan dan Solidaritas Sosial⁴⁰

- Dunia dewasa ini dicirikan oleh kesengsaraan dan ketidakadilan yang lebih meluas seperti: kelaparan, pengangguran, marginalisasi sosial, jurang pemisah antara negara, kelompok, dll.
- Maka *tolok ukur atau norma ketiga yang juga dibutuhkan adalah* perjuangan demi keadilan dan solidaritas sosial.

4. Pembinaan dalam Bidang-bidang keahlian dan suara hati⁴¹

- Politik praktis menjadi tugas khas kaum awam yang secara alamiah mengalir dari martabatnya sebagai manusia dan manusia beriman (dari baptisan dan Penguatan mereka). Untuk itu, mereka harus membiarkan dirinya dituntun terus menerus oleh suara hati kristiani.
- Berbarengan dengan pembinaan moral dan spiritual, mereka harus mendapatkan keahlian yang diperlukan dalam bidang keilmuan dan politik agar mereka mampu melaksanakan suatu tindakan efektif yang selaras dengan tolok ukur moral yang sah (GS 43, AA 13).
- Para imam mempunyai tugas untuk membantu para awam dalam pembentukan suara hati kristiani yang benar serta memberi mereka “kekuatan terang dan roh” (GS 43). Supaya para imam mampu menunaikan tugas khusus ini, maka mereka sendiri harus memahami benar dan menjunjung tinggi ajaran sosial dan memiliki kepekaan untuk bertindak di bidang ini dalam terang Sabda Allah dan teladan Tuhan.

³⁹ GS 28; Kompendium ASG No. 198; EG 239–240.

⁴⁰ GS 63–66; Kompendium ASG No. 193–196; Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis* (Keprihatinan akan Masalah Sosial) dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 3, terj. P. Turang (Jakarta: Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2003), no. 38-40. Untuk selanjutnya disingkat SRS.

⁴¹ GS 43; AA 13–14; Kompendium ASG No. 531–533

- Para imam dan orang beriman (awam) harus bersatu dan merasa dipersatukan untuk berpartisipasi dalam satu misi penyelamatan Gereja, masing-masing menurut kemampuannya sendiri.
- Maka, *tolok ukur keempat adalah* pembinaan dalam bidang-bidang keahlian sesuai dengan tugas panggilan masing-masing.

5. Pengalaman Realitas Duniawi dan Pengalaman Iman⁴²

- Jati diri gerejawi umat awam yang berakar pada Pembaptisan dan Penguatan dan diwujudkan dalam persekutuan dan perutusan, mengandung suatu pengalaman ganda: 1). Pengalaman yang didasarkan pada pengetahuan tentang realitas alamiah historis dan kultural dunia. 2). Pengalaman yang datang dari interpretasi mereka dalam terang Injil.
- Kedua pengalaman ini tidak dapat dipertukarkan; yang satu tidak dapat menggantikan yang lain, tetapi keduanya menemukan kesatuan dalam landasan awal mereka yakni Sabda Allah, melalui mana segala sesuatu dijadikan, serta dalam tujuan akhir mereka yakni Kerajaan Allah.
- Jadi, *tolok ukur kelima bagi aspek metodologis tindakan adalah* pemanfaatan pengalaman ganda ini: pengalaman tentang realitas duniawi dan pengalaman iman kristiani.
- Metode ini diterapkan dalam interpretasi ASG untuk membantu semua orang kristiani, terutama umat awam, dalam upaya menginterpretasi realitas secara lebih tepat.
- Dengan demikian, mereka mampu melihat tingkat perwujudan nilai-nilai manusiawi dan kristiani yang mengungkapkan martabat pribadi manusia ke dalam realitas historis. Mereka akan mampu:
 - 1) Mengaitkan prinsip-prinsip umum pemikiran dan tindakan di bidang sosial dengan nilai-nilai yang harus senantiasa dihormati suatu masyarakat agar permasalahannya terselesaikan.
 - 2) Berorientasi pada pengusahaan konkret jalan keluar yang diperlukan.
 - 3) Merangsang perubahan atau transformasi struktur-struktur masyarakat yang nampak tidak lagi memadai ataupun tidak adil.
 - 4) Mengevaluasi dengan arif program-program yang disusun oleh semua kekuatan politik dan budaya.

6. Interpretasi realitas dalam terang Injil⁴³

- Supaya dapat terlibat dalam kerasulan di bidang politik secara baik dan benar maka setiap umat beriman dipanggil untuk menginterpretasi realitas sosial dalam terang Injil. Hal ini diperlukan agar mampu melihat tingkat perwujudan nilai-nilai manusiawi dan Kristiani dalam kehidupan masyarakat.
- Interpretasi ini membutuhkan penggabungan dua pengalaman, yaitu pengetahuan tentang realitas duniawi (sejarah, budaya, ekonomi, politik) dan pengalaman iman yang bersumber dari Sabda Allah
- Tujuannya adalah: menilai struktur sosial secara kritis, merancang jalan keluar yang adil dan manusiawi, serta mendorong transformasi sosial yang sesuai dengan martabat manusia.

⁴² Kompendium ASG No. 522–525; CL. 23–24

⁴³ EG 74–75; Kompendium ASG No. 547–548

- Maka, *tolok ukur yang keenam* adalah bahwa realitas harus ditafsirkan dengan mata iman, agar tindakan sosial-politik menjadi partisipasi dalam karya keselamatan.
 - Paus Fransiskus menegaskan bahwa: “Realitas lebih penting daripada ide. Ini menuntut agar ide-ide tidak terpisah dari realitas, tetapi selalu berakar dan berkembang dalam realitas.”
 - Pada penegasan ini Gereja dipanggil untuk membaca tanda-tanda zaman, bukan hanya mengulang rumusan doktrinal.
 - Injil harus menyentuh kehidupan nyata, termasuk penderitaan, ketidakadilan, dan harapan manusia. Gereja harus mengutamakan proses inkarnasi, di mana Sabda menjadi daging dalam konteks sosial dan budaya. Injil bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk dihidupi dalam sejarah konkret umat manusia.
7. Keterbukaan pada karisma dan anugerah Roh Kudus⁴⁴
- Gereja tidak menawarkan model kehidupan sosial-politik sebagai sesuatu yang paling sempurna. Gereja tetap terbuka terhadap keragaman tertentu dari proyek-proyek dan hipotesis untuk bertindak, menurut karisma dan anugerah yang diberikan Roh kepada umat awam untuk menunaikan tugas perutusan mereka dalam lingkup keluarga, Gereja, ekonomi, politik, kebudayaan, teknologi, dll.
 - Maka *tolok ukur tindakan yang ketujuh* adalah keterbukaan kepada karisma-karisma dan anugerah-anugerah Roh Kudus demi komitmen dan pilihan orang kristiani dalam kehidupan social-politik.
8. Pengamalan Cinta dan Kemurahan Hati⁴⁵
- Kenyataan menunjukkan bahwa sejarah Gereja penuh terisi dengan karya-karya sosial cinta kasih dan bantuan (Surat Apostolik *Salvifici Doloris*). Dalam keseluruhannya, karya-karya ini memancarkan sinar wajah sebuah persekutuan yang bermurah hati yang berkehendak untuk mengamalkan “kotbah di bukit”.
 - Dari kenyataan kesadaran sosial seperti ini lahir *tolok ukur tindakan yang terakhir yang harus menjiwai tolok ukur lainnya*: pengamalan perintah cinta dan kemurahan hati dalam segala hal yang dalam terang Injil mengutamakan orang miskin.

KESIMPULAN

Politik merupakan dimensi kodrati dan hakiki dalam kehidupan manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari martabat pribadi dan panggilan sosialnya. Gereja Katolik, melalui ajaran sosial dan refleksi teologisnya, menegaskan bahwa keterlibatan dalam politik adalah bentuk konkret dari pelayanan kasih dan tanggung jawab iman. Dalam konteks ini, kaum awam dipanggil untuk menjadi pelaku aktif yang menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan publik, sementara para imam berperan sebagai pembina hati nurani dan penuntun moral umat.

Untuk mewujudkan keterlibatan politik yang cerdas, dibutuhkan kesadaran yang berakar pada moralitas dan iman, serta pembinaan yang menyeluruh dalam bidang

⁴⁴ LG12; CL 24; Kompendium ASG No. 557–558

⁴⁵ Yohanes Paulus II, *Salvifici Doloris* (Penderitaan yang Menyelamatkan), dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 29, terj. J. Hadiwikarta, Pr. (Jakarta: Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022), no. 29–30; Benediktus XVI, *Deus Caritas Est* (Allah adalah Kasih), dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 83, terj. Piet Go, O. Carm. (Jakarta: Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022), No. 25–28.; Kompendium ASG No. 580–582.

keahlian, spiritualitas, dan pengalaman sosial. Delapan tolok ukur tindakan politik yang cerdas—mulai dari penghormatan terhadap martabat manusia hingga pengamalan cinta kasih—menjadi pedoman praktis dan profetis bagi umat Katolik dalam membangun budaya politik yang adil, dialogis, dan berorientasi pada *bonum commune*.

DAFTAR PUSTAKA

- Autiero A., "Sessualita", dalam F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, eds, *Nuovo Dizionario di Teologia Morale*. Cinisello Balsamo: San Paolo Edizioni, 1999.
- Benediktus XVI, *Deus Caritas Est* (Allah adalah Kasih), dalam Seri Dokumen Gerejawi, terj. Piet Go, O. Carm. Jakarta: Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022.
- Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*, terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta: KWI, 2007.
- Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta: KWI, 2007.
- Fransiskus, *Evangelii Gaudium* (Sukacita Injil), dalam Seri Dokumen Gerejawi, terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta: KWI, 2017.
- Fransiskus, *Fratelli Tutti* (Semua Saudara), Seri Dokumen Gerejawi, terj. Martin Harun, OFM. Jakarta: Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Katekismus Gereja Katolik*, terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta: KWI, 2004.
- Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*), terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta: KWI, 2004.
- Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Peran Serta Umat Katolik dalam Kehidupan Politik*, dalam *Seri Dokumen Gerejawi*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2003.
- Konsili Vatikan II, *Apostolicam Actuositatem* (Dekrit tentang Kerasulan Awam) dalam Seri Dokumen Konsili Vatikan II, terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta: KWI, 2005.
- Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* (Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini), Penerjemah R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1993.
- Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium* (Konstitusi Dogmatis tentang Gereja), Penerjemah R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1993.
- Koten, Yosef Keladu, *Partisipasi Politik. Sebuah Analisis atas Etika Politik Aristoteles*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Lilijawa, Isidorus, *Mengapa Takut Berpolitik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007.
- Moa, Antonius, *Seksualitas Manusia sebagai Realitas dan Panggilan kepada Cinta Kasih, Refleksi atas Hakikat Seksualitas Manusia. Logos (Volume 3/Nomor 1)*, 2004.
- Palumbieri S., *L'Uomo, Questa Meraviglia. Antropologia Filosofica I, Trattato sulla Costituzione e Antropologica* (Manuali). Roma: Urbaniana University Press, 1999.
- Setiawan, Hendro, *Pergilah, Kita Diutus. Sebuah Refleksi atas Perutusan Awam Katolik di Masa Kini*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Yohanes Paulus II, *Christifideles Laici* (Seruan Apostolik tentang Panggilan dan Perutusan Kaum Awam dalam Gereja dan Dunia), terj. Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI. Jakarta: KWI, 2005.

Yohanes Paulus II, *Salvifici Doloris* (Penderitaan yang Menyelamatkan), dalam Seri Dokumen Gerejawi, terj. J. Hadiwikarta, Pr.. Jakarta: Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022.

Yohanes Paulus II, *Sollicitudo Rei Socialis* (Keprihatinan akan Masalah Sosial) dalam Seri Dokumen Gerejawi, terj. P. Turang. Jakarta: Komisi Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2003.